

BAB VI

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis dan perhitungan maka secara keseluruhan dapat disimpulkan sbb:

1. Perbandingan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota Se-Daratan Timor Tahun Anggaran 2009-2011, yang memiliki PAD terbesar adalah Kota Kupang, diikuti oleh Kabupaten Belu, selanjutnya Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan dan yang memiliki PAD terkecil adalah Kabupaten Timor Tengah Utara.
2. Untuk Kabupaten Kupang pada Tahun 2009, sumber PAD terbesar adalah dari Lain-lain PAD yang sah, Tahun 2010 dan 2011 dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2009 dan 2010 yang menjadi sumber PAD terbesar adalah dari lain-lain PAD yang sah dan tahun 2011 dari Retribusi Daerah. Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2009-2011 sumber PAD terbesar adalah dari lain-lain PAD yang sah, Kabupaten Belu Tahun 2009-2010 yang menjadi sumber PAD terbesar adalah dari lain-lain PAD yang sah dan tahun 2011 dari Retribusi Daerah sedangkan Kota Kupang Tahun 2009-2011 penyumbang terbesar terhadap PAD adalah dari Pajak Daerah.

1.2 Saran

Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah, maka penulis memberikan saran sbb:

1. Dilihat dari pendapatan daerah yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota se-Daratan Timor Provinsi NTT, maka Pemerintah Daerah dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya pada sisi pajak daerah dan retribusi daerah dengan menggali potensi-potensi yang ada di daerah masing-masing.
2. Apabila potensi PAD yang akan digali menjadi sumber PAD namun biaya pemungutan menjadi kendala atau biaya pemungutan lebih besar atau sama dengan pendapatan yang dihasilkan, maka penulis menyarankan agar potensi-potensi PAD yang membutuhkan biaya sedikit untuk memungutnya namun hasilnya sangat berarti bagi Pendapatan Asli Daerah masing-masing daerah menjadi prioritas.
3. Agar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Daratan Timor masing-masing selalu menghimbau para wajib pajak untuk jujur melaporkan pendapatan masing-masing guna perhitungan besaran pajak secara tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra, 2006, **Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia**, Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Halim, Abdul, 2002, **Akuntansi Keuangan Daerah**, Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- _____, 2007, **Akuntansi Sektor Publik; Akuntansi Keuangan Daerah**, Penerbit Salemba Empat, Edisi Revisi, Jakarta
- _____ dan Theresia Damayanti, 2007, **Pengelolaan Keuangan Daerah**, STIM YPKN, Yogyakarta
- HAW, Widjaja, 2007, **Otonomi Daerah dan Daerah Otonom**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Mahmudi, 2007, **Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**, STIM YPKN, Yogyakarta
- Mardiasmo, 2002, **Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah**, Penerbit ANDI, Yogyakarta
- _____, 2004, **Akuntansi Sektor Publik**, Penerbit ANDI, Yogyakarta
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 **tentang Pengelolaan Keuangan Daerah**, Jakarta
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 **tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah**
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 **tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah**
- Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 75 Tahun 2008 **tentang Sistem Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur**
- Ritonga, Irwan Taufiq, 2010, **Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah di Indonesia**, Penerbit Sekolah Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta
- Suhadak dan Trilaksono Nugroho, 2007, **Paradigma Baru, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Penyusunan APBD di Era Otonomi**, Penerbit Bayumedia, Malang
- Sugiono, 2001, **Metode Penelitian Bisnis**, Penerbit Alfabeta, Bandung

- Saragih Juli Panglima, 2003, **Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi**, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta
- Supriady Deddy dan Solhin Dadang, 2002, **Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**, PT Gramedia Pustaka Indonesia, Jakarta
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 **tentang Pemerintah Daerah**, Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 **tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah**
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000, **tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 **tentang Pemerintah Daerah**
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 **tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah**, Pusat Info Data Jakarta
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 **tentang Pengelolaan Keuangan Daerah**
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 **tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**